BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunanya harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut lebih jeli dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan otonomi daerah tersebut.

Kapabilitas bisnis dan masyarakat harus diperkuat yang otomatis akan memperkuat kapabilitas pemerintah daerah, sehingga akan mampu menumbuhkan kemandirian daerah serta tidak tergantung lagi dengan dana alokasi umum.

Pertumbuhan ekonomi global merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Pertumbuhan perusahaan memungkinkan terjadinya pemupukan tabungan yang progresif, penambahan modal dan diversifikasi produksi.

Sehingga perusahaan dapat dikatakan sebagai mesin kerja sama. Semakin cepat jumlah perusahaan tumbuh di suatu negara, maka semakin luas pula ruang lingkup kerja sama terbentuk di sana.

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang dituntut untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Selain Koperasi, Swasta, lalu penghasilan dari pajak atau pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah seperti dari kantor perusahaan jenis atau macam Lembaga Pemerintah Non Departemen (kementerian). .

Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional (BPN) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan BPN Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Dalam laporan keuangan adapun meliputi hal lainnya yaitu laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur laporan keuangan :

Laporan realisasi anggaran:

1. LRA tahunan kementrian negara atau lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 tahunan lingkup kementerian negara / lembaga yang bersangkutan .

2. LRA tahunan kementrian negara atau lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA tahunan UAKPA di bawah eselon I, LRA tahunan UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU,LRA tahunan UAPPA-W, dan LRA tahunan UAPPA-W dekonsentarasi / tugas pembantuan / urusan bersama.
3. LRA UAPPA-W tahunan disusun bersarkan hasil penggabungan LRA tahunan UAKPA lingkup wilayah bersangkutan.
4. LRA tahunan UAPPA-W dekonsentarasi / tugas pembantuan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA tahunan UAKPA denkonsentarasi / tugas pembantuan / urusan bersama lingkup wilayah yang bersangkutan.

Salah satu alasan dilakukannya tinjauan terhadap laporan keuangan adalah menilai kinerja perusahaan. Dimana penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efesiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai perusahaan atau kantor yang bertugas untuk perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. Lalu mengkoordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan dan menyelenggarakan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.

Serta penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan pengawasan dan

pengendalian penguasaan pemilikan tanah. Maka Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menempuh langkah-langkah yang diperlukan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan dan fungsinya tersebut

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***"Tinjauan Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan di Kantor Pertanahan Kota Bandung (BPN)"*** ber domisili di Bandung Jawa barat.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Kegiatan kuliah kerja praktek ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan data, mengolah, serta meninjau Laporan Realisasi anggaran Pada Laporan Keuangan di Kantor Pertanahan Kota Bandung (BPN). Bandung Jawa Barat.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bandung Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bentuk Laporan Keuangan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bandung Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penanggulangan dalam pembuatan laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bandung Jawa Barat.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil kerja praktek adalah:

1. Bagi Penulis

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Laporan Keuangan pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bandung, Jawa Barat.

b. Untuk mengetahui bentuk Laporan Keuangan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bandung, Jawa Barat.

2. Bagi Perusahaan

a. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan penggunaan anggaran dana maupun tinjauan laporan keuangan. Serta diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan bagian keuangan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bandung, Jawa Barat.

b. Hasil kerja praktek ini diharapkan akan dijadikan sebagai informasi dan merupakan sumbangan yang berarti bagi pihak perusahaan.

3. Bagi UNIKOM

a. Memberikan peluang atau kesempatan bekerja di Instansi tempat kerja praktek.

b. Membuka kerja sama dengan perusahaan untuk bidang kerja praktek.

1.4. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

a. Lokasi Kerja Praktek

Alamat	:	Jl. Soekarno – Hatta No.586
Kota	:	Bandung
Provinsi	:	Jawa Barat

Telepon : +62.22.7562055 – Fax. +62.22.7566165

Email : kot-bandung@bpn.go.id

b. Waktu Kerja Praktek:

15 juli – 20 agustus 2013

Jam kerja :

Senin – Jum'at

Mulai jam 08.00 – 16.00 WIB

Hari Libur :

Sabtu dan Minggu